

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN SOSIAL

Studi pada Program Keluarga Harapan (PKH)

Rima Puspitasari
IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Pendahuluan

PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai program conditional cash transfer (CCT) atau program bantuan tunai bersyarat. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah), ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (misalnya bagi anak balita, atau bagi ibu hamil).

Tujuan PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin.

Pelaksanaan PKH juga mendukung upaya pencapaian tujuan pembangunan Millenium. Lima komponen tujuan MDG's yang akan terbantu oleh PKH yaitu: pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, pengurangan kematian ibu melahirkan.

PKH diberikan kepada keluarga sangat miskin (KSM). Data keluarga yang dapat menjadi peserta PKH yaitu:

1. Ibu Hamil/ nifas/ anak balita.
2. Anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak pra sekolah)
3. Anak usia SD/MI/Paket A/ SDLB (usia 7-12 tahun)
4. Anak SLTP/MTs/Paket B/SMLB (usia 12-15)
5. Anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar termasuk dengan anak disabilitas.¹

Seluruh keluarga di dalam suatu rumah tangga berhak menerima bantuan tunai apabila memenuhi kriteria kepesertaan program dan memenuhi kewajibannya.

Kewajiban peserta PKH yaitu:

1. Menghadiri pertemuan awal.
2. Mendaftarkan anak ke satuan pendidikan.
3. Mematuhi komitmen.

Teknik pelaksanaan program ini didasarkan pada 3 hal sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Verifikasi, yang merupakan esensi utaman dari PKH. Kegiatan verifikasi mengecek kepatuhan peserta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
2. PKH melaksanakan pemotongan bantuan tunai bagi keluarga yang tidak mematuhi kewajiban yang telah ditetapkan.
3. Peserta PKH mengetahui persis bahwa mereka harus memenuhi sejumlah kewajiban untuk dapat menerima bantuan tunai.

Semua peserta wajib menjalankan kewajiban, apabila tidak memenuhi kewajiban, maka jumlah bantuan yang diterima akan dikurangi bahkan bantuan dapat dihentikan. Program keluarga harapan termasuk program jangka panjang, namun peserta PKH tidak akan bersifat permanen. Peserta penerima bantuan PKH diberikan selama enam tahun. Selama mereka masih memenuhi persyaratan yang ditentukan, apabila tidak ada lagi persyaratan yang mengikat, maka mereka harus

¹ <http://www.tnp2k.go.id/id/program-keluarga-harapan-pkh/> (Diakses tanggal 21 November 2016)

keluar. Peserta yang tidak keluar, setelah enam tahun diharapkan terjadi perubahan perilaku terhadap peserta PKH dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan status sosial ekonomi.

PKH merupakan program pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) bekerjasama dengan Dinas Sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Program pemerintah sendiri tidak lepas yang dari namanya pembangunan terutama program PKH ini, merupakan program pembangunan sosial.

Menurut Midgley, pembangunan sosial adalah suatu proses perubahan sosial yang terencana yang di desain untuk mengangkat kesejahteraan penduduk secara menyeluruh, dengan menggabungkannya proses pembangunan ekonomi yang dinamis.² Tujuan pembangunan sosial adalah mengangkat kesejahteraan sosial, sejahtera dari kondisi sosial yaitu, dapat terpenuhi tidak kebutuhan dasarnya, dan dapat atau tidak tercipta kesempatan sosialnya. Tujuan pembangunan sosial didukung dengan berbagai macam strategi baik secara langsung maupun tidak langsung. Agar tujuan tercapai maka kita perlu mengetahui strategi pembangunan sosial terlebih dahulu. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan strategi pembangunan sosial oleh individu, strategi pembangunan sosial oleh masyarakat, strategi pembangunan sosial oleh pemerintah dan analisis strategi pembangun sosial dengan program keluarga harapan (PKH).

Strategi Pembangunan Sosial Oleh Individu

Strategi pembangunan sosial individu adalah kesejahteraan masyarakat keseluruhan dapat diangkat ketika para individu berusaha untuk mengangkat kesejahteraan mereka masing-masing. Hal yang normative ini juga mendasari pendekatan 'indivisualis' dan pendekatan 'enterprise (usaha)' pada pembangunan

²James Midgley, *Pembangunan Sosial, Pespektif Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Ditperta Islam), tahun 2005, hal 35.

sosial ini. Pada intervensi skala besar yang menciptakan kultur ‘enterprise’ yang kondusif untuk keberhasilan individu, juga intervensi skala kecil yang membantu keluarga berpendapatan rendah, pelaku usaha kecil dan mereka yang disebut dengan sektor informal yang berkerja secara efektif dalam pasar.

a. Menunjang Budaya ‘enterprise’ atau Usaha untuk Mengangkat Kemajuan Sosial

Pendekatan individualis ini hanya akan efektif bila ada sebuah perorangan untuk berfungsi sebagai aktor ekonomi yang rasional. Para pendukung strategi individualis berpendapat bahwa budaya enterprise yang positif harus diciptakan oleh pemerintah dan badan lain dalam mendorong usaha individu. Beberapa pendukung pendekatan individualistik, berpendapat bahwa pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam menciptakan kondisi untuk menunjang usaha, penciptaan lapangan kerja dan perkembangan ekonomi yang cepat. Banyak yang percaya bahwa pemerintah seharusnya menciptakan institusi yang dibutuhkan untuk mengangkat budaya ‘enterprise’ ini.

Istilah ‘pembangunan institusi’ seringkali digunakan oleh para pendukung pendekatan individualis. Mereka berpendapat bahwa individu hanya dapat mengangkat kesejahteraan mereka sebagai aktor ekonomi yang mandiri bila pemerintah menciptakan institusi yang akan memfasilitasi efisiensi mereka dalam penggunaan pasar. Ini membutuhkan berdirinya institusi yang mendukung pasar dan meningkatkan kemampuan mereka untuk berfungsi secara efektif.

b. Mengangkat Usaha Kecil untuk Rakyat yang Membutuhkan

Para pendukung pendekatan individualis ini juga percaya bahwa pemerintah seharusnya menciptakan kondisi yang kondusif untuk munculnya usaha skala kecil yang memberikan kesempatan bagi orang miskin untuk

mengumpulkan sumber yang mereka butuhkan untuk memenuhi kebutuhan sosial mereka. Ernst Schumacher (1974) dan George MCRobie (1981) berpendapat bahwa masalah hutang dapat dihindari lewat pembangunan skala kecil. Bila individu yang mampu dapat membangun usaha kecil, perekonomian akan tumbuh sesuai yang direncanakan dan meluas lewat usaha lokal bukan pada investasi eksternal.

Pada usaha kecil sebagai sebuah mekanisme pembangunan sosial dimulai dengan mengidentifikasi apa yang biasa disebut dengan 'sektor informal'. Hernandode Soto (1989) menunjukkan bagaimana sektor informal ini telah berhasil menyokong kehidupan mereka sendiri kendati banyak hambatan yang datang dari negara dan kegiatan mereka sukses ketika negara gagal melakukannya. Sejak 'penemuan' sektor informal ini, beberapa pakar ilmu sosial berpendapat bahwa pertumbuhan usaha kecil menawarkan masa depan bagi pembangunan. Di lain pihak Bromley dan Gerru (1979) menunjukkan bahwa banyak pekerjaan sektor informal yang dibayar sangat kecil dengan pekerjaan yang berat, dan mereka tidak memberikan kesempatan untuk peningkatan. Banyak aktifitas sektor informal seperti layanan domestik, pekerjaan rumah tangga dan pemulung yang secara ekonomi tidak produktif dan sangat eksploitatif.

Pendukung pendekatan individualis mendesak pemerintah untuk mengadopsi cara-cara yang mendukung dan menguatkan usaha skala kecil untuk menunjang tidak hanya pembangunan ekonomi juga pembangunan sosial. Rekomendasi lain yang dapat diberikan bahwa pemerintah dapat melonggarkan pembatasan yang diberikan pada sektor informal. Sebagian besar ahli mendesak pemerintah untuk meningkatkan fasilitas kreditnya untuk usaha kecil, membangun infrastruktur seperti daerah industri dan pasar yang dapat menunjang usaha ini, memberikan pelatihan manajemen bagi pengusaha kecil dan menyediakan layanan luas yang membantu bisnis kecil dengan desain produk, pemasaran, perencanaan keuangan dan aktifitas rutin serupa. Para ahli

juga mendesak pemerintah untuk meningkatkan pelayanan dan pembelian barang dari sektor informal dan mendorong perusahaan besar untuk mempercayakan sebagian produksi mereka pada sektor informal.

c. Mengangkat Kesejahteraan Sosial dengan Meningkatkan Fungsi Individu

Para pendukung individualistic percaya jika manusia dapat mengangkat kesejahterannya sendiri, mereka harus mampu berfungsi secara efektif dan bekerja dengan percaya diri dalam konteks budaya 'enterprise/usaha'. Strategi yang menciptakan sebuah budaya usaha dan menciptakan kesempatan bagi usaha skala kecil hanya akan efektif apabila rakyat menggunakan kesempatan yang diberikan.

Pekerja sosial muncul dari usaha-usaha Organisasi Amal Masyarakat (the *Charity Organization society*) untuk 'menyembuhkan' sebab malfungsi yang ada pada orang miskin. pekerja sosial sangat berkomitmen pada pendekatan psikoterapis yang terkait pada semua masalah sosial, kemiskinan, malfungsi individu.³

Strategi Pembangunan Sosial Oleh Masyarakat

Pembangunan sosial dapat dengan baik diangkat oleh rakyat sendiri. Dengan membentuk kerjasama secara harmonis antar masyarakat lokal itu sendiri membentuk dasar apa yang disebut dengan pendekatan kemasyarakatan pembangunan sosial.

a. Pembangunan Masyarakat dan Pembangunan Sosial

Istilah 'pembangunan sosial' sebagai istilah yang diciptakan oleh Inggris untuk mengkonotasikan dua elemen pada kebijakan sosial kolonial: yang

³ *Ibid*, James Midgley, hal 150-166.

disebut dengan kesejahteraan remedial dan pembangunan masyarakat. Di beberapa negara, pembangunan masyarakat sangat terkait erat dengan pemerintah lokal. Pendekatan ini menekankan pada organisasi politik lokal dan usaha bersama yang diatur oleh tokoh setempat dengan dukungan dari pemerintah pusat.

Di sebagian besar kasus, pembangunan ekonomi mengambil pendekatan materialistis yang mendorong pembangunan proyek pusat kemasyarakatan, sekolah, klinik, jalan dan sanitari beserta penyediaan air bersih. Tetapi dikasus lainnya, banyak yang lebih menekankan pada aspek non-materi dan ideational. Ini termasuk mengangkat identitas masyarakat, menguatkan partisipasi secara demokratis dan menunjang kemandirian dan keyakinan diri.

Pengembangan masyarakat juga selalu didefinisikan sebagai *partnership* antara badan eksternal dan masyarakat lokal. Biasanya, masyarakat lokal memberikan kontribusi tenaga mereka dan sumber lokal sedang badan pengembangan masyarakat memberikan keahlian teknis dan sumber eksternal. Program pengembangan masyarakat juga telah meningkatkan aktifitas produktif. Banyak masyarakat yang membangun kerjasama yang mendukung produksi, membantu proses penyimpanan, dan memfasilitasi pemasaran retail dan barang.

b. Aksi Masyarakat, Partisipasi dan Pembangunan

Kendati dengan hasil yang tidak diragukan, ada kekecewaan pada pengembangan masyarakat pada tahun 1970an. Banyak kritik yang mengklaim bahwa birokrasi pembangunan sosial telah makin besar dan tidak lagi efisien, juga tidak adanya tanggungjawab serta korupsi yang makin meluas. Pada situasi seperti ini aksi masyarakat alternative atau pendekatan partisipasi masyarakat muncul. Tidak seperti pengembangan masyarakat, pendekatan ini lebih anti pada pemerintah, menolak sponsor pemerintah pada masyarakat lokal. Dari pada bergantung pada pemerintah untuk menyediakan keahlian teknikal dan

sumber yang dibutuhkan, pendukung pendekatan aksi masyarakat mendesain masyarakat lokal untuk mengambil ahli kontrol aktifitas pengembangan masyarakat dan bergantung pada inisiatif mereka sendiri.

Pendekatan aksi masyarakat juga berusaha untuk menargetkan kelompok yang paling miskin dan lemah.

c. Perempuan, Gender dan Pembangunan Sosial

Istilah 'gender' secara luas dipergunakan pada lingkaran ilmu sosial untuk mengkonotasikan peran yang di tentukan secara budaya. Gender terkait tidak hanya dengan karakter seksual tetapi pada perbedaan sosial yang berdasarkan dari karakter ini.

Dengan pandangan diskriminasi institusional terhadap perempuan, tidak mengejutkan bahwa perempuan telah lama ditelantarkan dalam pembangunan. Menurut Rogers, wanita jarang sekali bekerja pada badan pembangunan pemerintah atau organisasi internasional yang terkait dengan isu-isu pembangunan. Kebijakan perencanaan dan proyek pembanguna secara konvensional telah didesain untuk melayani kepentingan laki-laki dan jarang mementingkan keberadaan wanita apalagi kebutuhan khusus dan pendapat mereka.

Ester Boserup (1970) yang dengan kerja rintisannya mendapat perhatian tentang fakta paradox bahwa perempuan khususnya di desa, memberikan kontribusi yang besar pada pembangunan ketika hanya mengambil sedikit keuntungan dari usaha pembangunan.

Caroline Moser (1989) juga telah melihat kembali pendekatan yang berbeda yang telah muncul selama bertahun-tahun untuk menyentuh isu perempuan pada pembangunan. Pendekatannya yaitu:

1. Pendekatan Kesejahteraan (*Welfare Approach*) memandang wanita sebagai penerima program pengembangan khusus yang pasif yang di disain untuk menyentuh kebutuhan mereka sebagai ibu dan ibu rumah tangga.

2. Pendekatan Ekuitas (*Equity Approach*) yang berusaha untuk meningkatkan status perempuan dan mendorong persamaannya dengan laki-laki lewat akses pekerjaan, gaji, yang sama dan kesempatan yang lebih besar.
3. Pendekatan Anti Kemiskinan (*Anti-poverty Approach*) karena ia berusaha untuk menunjang kerja swasta yang produktif diantara perempuan berpendapatan rendah. Dengan menciptakan proyek skala kecil yang mendatangkan penghasilan diantara perempuan miskin, ini berarti bahwa perempuan dapat meningkatkan status mereka lewat pembangunan ekonomi.
4. Pendekatan Efisiensi (*Efficiency Approach*) karena ia berusaha untuk meningkatkan keterlibatan wanita dalam perempuan dengan dasar bahwa perempuan adalah sumber produktif yang berguna untuk pertumbuhan ekonomi.
5. Pendekatan Pemberdayaan (*Empowerment Approach*), yang banyak diartikulasikan oleh perempuan sendiri. Ini mengaitkan penindasan perempuan tidak hanya pada patriarki tetapi pada imperialisme dan neokolonialisme. Ini menandakan bahwa posisi perempuan hanya dapat lebih baik ketika perempuan menjadi mandiri dan melatih kontrolnya pada pembangunan keputusan yang berdampak untuk hidupnya.⁴

Strategi Pembangunan Sosial Oleh Pemerintah

Pembangunan sosial dapat diangkat oleh pemerintah dengan agen-agen yang khusus, pembuatan kebijakan, para perencana dan administrasinya membentuk dasar pendekatan 'statist/negara' pada pembangunan sosial. Berdasarkan ideology kolektifis, pendukung strategi negara ini percaya bahwa negara mewakili kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan ia mewakili tanggungjawab untuk mengangkat kesejahteraan seluruh warganegaranya.

⁴ *Ibid*, James Midgley, hal 166-180.

a. Mengangkat Pembangunan Sosial Lewat Perencanaan Terpadu

Berdasarkan ide yang utopis, juga teori sosiologi dalam perubahan yang terarah, pendukung perencanaan berpendapat bahwa proses sosial dan ekonomi dapat diarahkan lewat intervensi rasional untuk memperbaiki pemerintah.

Pada tahun 1980an, kemajuan yang besar telah dilakukan dalam menghubungkan perencanaan sosial dan ekonomi dan mengangkat pendekatan terpadu pada pembangunan. Pendekatan terpadu ini dalam perencanaan pembangunan membutuhkan ekonomi pemerintah dan perencanaan sosial yang dengan hati-hati dapat diharmonisasikan. Pendekatan terpadu ini memberikan penekanan yang sama pada pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial dan membutuhkan komitmen yang sama antara perencanaan ekonomi dan sosial untuk mengangkat kesejahteraan penduduk.

b. Pertumbuhan Ekonomi, Kesejahteraan dan Kemerataan

Pendekatan sosio-ekonomi mengasumsikan bahwa pertumbuhan akan menciptakan lapangan kerja pada sektor modern, meningkatkan pendapatan dan akhirnya mengurangi kemiskinan. Perencanaan sosio-ekonomi ini mengklaim bahwa pertumbuhan adalah dasar yang tidak cukup untuk mengangkat kesejahteraan sosial.

Tahun 1970an, banyak pendukung statis/negara mengklaim bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki dampak besar pada masalah kemiskinan dan kekurangan. Banyak ahli pembangunan sosial bahwa keuntungan pertumbuhan telah tidak merata dibagikan. Mereka mengklaim bahwa pertumbuhan ekonomi tidak meningkatkan tingkat hidup kelompok termiskin tetapi malah memperkaya para elit pejabat dan politik.

Gunnar Myrdal (1970) adalah pendukung utama pada penekanan baru pada pembangunan yang egalitarian, dengan mengklaim bahwa ketidakmerataan yang ada menjadi halangan untuk modernisasi ekonomi. Pertumbuhan dan Kemerataan tidak sejalan dan berpendapat bahwa mungkin

bagi pemerintah untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi ketika pada saat yang sama memastikan bahwa sumber yang dihasilkan pertumbuhan ekonomi dapat secara merata di distribusikan.

c. Kesejahteraan Sosial dan Kebutuhan Dasar

Paul Streeten (et al.1981) telah berpendapat bahwa lebih penting bagi pemerintah untuk menyentuh masalah dasar kemiskinan dan kekurangan di negara berkembang dari pada mendistribusikan sumber.

Pendekatan kebutuhan dasar mendesak pemerintah untuk menggunakan perencanaan sosial dan program layanan masyarakat yang ada untuk menyentuh kebutuhan yang tidak terpenuhi bagi kelompok termiskin di negara-negara berkembang. Kebutuhan ini terdiri dari:

1. kebutuhan untuk kelangsungan hidup seperti nutrisi, persediaan air minum dan pemukiman.
2. kebutuhan yang bukan kebutuhan primer tetapi dipandang sebagai hak sosial dimana masyarakatnya menjaminnya sendiri untuk anggota masyarakatnya, ini termasuk pendidikan, kesehatan, keamanan sosial.
3. kebutuhan non-materi seperti kebutuhan untuk berpartisipasi pada proses politik, dilindungi dari diskriminasi dan memiliki kesempatan yang sama untuk perbaikan hidup.

d. Pembangunan yang Berkesinambungan

Michael Redclift (1987) menunjukkan bahwa konsep berkesinambungan telah lama digunakan pada lapangan kehutanan dan agrikultur untuk menggambarkan usaha untuk mengisi sumber alam lewat manajemen sumber yang hati-hati.

Pembangunan berkesinambungan ini oleh karena itu menjadi pembangunan telah lama dengan memastikan bahwa kepentingan generasi yang akan datangpun terpenuhi (World Bank 1992:334). Di definisikan dengan

konteks ekologi yang spesifik, pembangunan berkesinambungan menciptakan sebuah proses yang memastikan bahwa sumber alam dapat terisi dan generasi yang akan datang terus memiliki sumber yang mereka butuhkan.

Adopsi yang berhasil pada pembangunan yang berkesinambungan ini membutuhkan pemerintah untuk memberikan komitmen yang pasti dalam melindungi lingkungan dan pada saat yang sama berkomitmen pada diri sendiri untuk menjaga kesejahteraan warganegaranya.⁵

Analisis Strategi Pembangunan Sosial dengan Keluarga Harapan (PKH)

Program keluarga harapan (PKH) dalam memberdayakan masyarakatnya lebih cenderung menggunakan strategi pembangunan sosial oleh individu. Strategi pembangunan sosial individu adalah kesejahteraan masyarakat keseluruhan dapat diangkat ketika para individu berusaha untuk mengangkat kesejahteraan mereka masing-masing. Dalam strategi pembangunan sosial oleh individu untuk mengangkat kesejahteraan individu masing-masing dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu: *pertama*, menunjang budaya 'enterprise' atau usaha untuk mengangkat kemajuan sosial. Menunjang budaya 'enterprise' atau mengangkat usaha kemajuan sosial di perlukan peran pemerintah dalam pembangunan institusi yang akan memfasilitasi efisiensi mereka dalam penggunaan pasar dan meningkatkan kemampuan mereka untuk berfungsi secara efektif.

Dapat dilihat PKH merupakan program pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) bekerjasama dengan Dinas Sosial, artinya PKH merupakan program yang didalamnya ada peran pemerintahnya. Peran pemerintah disini yaitu, memberikan bantuan langsung tunai.

Cara kedua, mengangkat usaha kecil untuk rakyat yang membutuhkan. Pada cara ini pemerintah harus meningkatkan fasilitas dan menyediakan layanan kepada

⁵ *Ibid*, James Midgley, hal 182-199.

sektor informal. Sektor informal PKH yaitu peserta yang menerima bantuan langsung tunai rumah tangga sangat miskin (RTSM) seperti, ibu hamil, anak balita, anak disabilitas, dan anak putus sekolah. Pemerintah disini harus memberikan fasilitas pada pembangunan infrastruktur seperti sekolah untuk anak disabilitas, rumah sakit dan lain-lain. Selain meningkatkan fasilitas, pemerintah juga harus menyediakan layanan untuk mempermudah RTSM dalam menerima bantuan langsung tunai, seperti mekanisme pelaksanaan PKH yaitu, RTSM harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu, setelah memenuhi persyaratannya mereka dapat mengambil bantuan langsung tunai tersebut di kantor POS.

Ketiga, mengangkat kesejahteraan sosial dengan meningkatkan fungsi individu. Mengangkat kesejahteraan sosial dan meningkatkan fungsi individu, dimana individu harus berfungsi secara efektif dan bekerja dengan percaya diri sesuai dengan kemampuannya. Agar individu berfungsi secara efektif dan bekerja dengan percaya diri sesuai dengan kemampuannya maka dibutuhkan pekerja sosial. Pekerja sosial dalam PKH yaitu orang-orang yang membantu dalam proses pelaksanaan PKH seperti, guru, perawat, anggota Kecamatan dan lain-lain.

Selain strategi pembangunan sosial oleh individu, ada juga strategi pembangunan sosial oleh masyarakat yaitu: Pertama, pembangunan masyarakat dan pembangunan sosial. Kedua, aksi masyarakat, partisipasi dan pembangunan. Ketiga, perempuan, pemberdayaan dan pembangunan sosial. Pada cara ketiga dimana perempuan dijadikan sebagai subjek dalam pembangunan sosial. Caroline Moser (1989) juga telah melihat kembali pendekatan yang berbeda yang telah muncul selama bertahun-tahun untuk menyentuh isu perempuan pada pembangunan. Pendekatannya yaitu: pendekatan kesejahteraan, pendekatan ekuitas, pendekatan anti kemiskinan, pendekatan efisiensi, pendekatan pemberdayaan.

Berdasarkan pendekatan Caroline Moser (1989) menyentuh isu perempuan dalam pembangunan. Salah satu peserta PKH yaitu ibu hamil/ nifas, yang menerima bantuan langsung tunai, dengan program keluarga harapan (PKH) dapat

mengurangi tingkat kematian yang terjadi pada ibu hamil/nifas. Berdasarkan pendekatan Caroline Moser (1989) menyentuh isu perempuan dalam pembangunan ibu hamil/nifas melalui pendekatan kesejahteraan (Welfare Approach) dimana memandang ibu hamil/nifas sebagai penerima program pengembangan khusus yang pasif yang di disain untuk menyentuh mereka sebagai ibu dan ibu rumah tangga.

Selanjutnya ada strategi pembangunan sosial oleh pemerintah yaitu: *pertama*, mengangkat pembangunan sosial lewat perencanaan terpadu. Perencanaan terpadu yaitu perencanaan pembangunan membutuhkan ekonomi pemerintah dan perencanaan sosial yang dengan hati-hati dapat diharmonisasikan. Perencanaan terpadu yaitu perencanaan yang di berikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemberian bantuan langsung tunai PKH yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah yaitu Kementerian sosial (kesos) bekerja sama dengan Dinas sosial kemudian setiap provinsi menerima bantuan langsung tunai PKH. Dari provinsi langsung diberikan kecamatan- kecamatan untuk rumah tangga sangat miskin (RTSM).

Kedua, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan pemerataan. Pertumbuhan ekonomi dapat meningkat, kesejahteraan masyarakat tercapai apabila pemerintah harus memastikan bahwa sumber yang dihasilkan pertumbuhan ekonomi dapat secara merata di distribusikan. Peserta penerima program keluarga harapan (PKH) dapat merata, penerima bantuan langsung tunai peserta di harapkan memenuhi persyaratan terlebih dahulu. Ketika persyaratan terpenuhi mereka dapat menerimanya dan dapat membatu kesejahteraan hidupnya.

Ketiga, kesejahteraan sosial dan kebutuhan dasar. Pendekatan kebutuhan dasar mendesak pemerintah untuk menggunakan perencanaan sosial dan program layanan masyarakat yang ada untuk menyentuh kebutuhan yang tidak terpenuhi bagi kelompok termiskin di negara-negara berkembang. Kebutuhan ini terdiri dari: kebutuhan untuk kelangsungan hidup, kebutuhan yang bukan primer, kebutuhan

non-materi. Pemerintah dalam membuat program keluarga harapan (PKH) lebih menggunakan pendekatan kebutuhan yang bukan primer karena dipandang sebagai hak sosial dimana masyarakatnya menjaminnya sendiri untuk anggota masyarakatnya, ini termasuk pendidikan, kesehatan, keamanan sosial. Bantuan Langsung tunai PKH di tujukan untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM).

Keempat, Pembangunan berkesinambungan. Pemerintah untuk memberikan komitmen yang pasti dalam melindungi lingkungan dan pada saat yang sama berkomitmen pada diri sendiri untuk menjaga kesejahteraan warganegaraanya. Program keluarga harapan diberikan selama enam tahun oleh pemerintah kepada RTSM, apabila mereka masih memenuhi syarat. Apabila tidak maka bantuan tersebut akan diberentikan.

DAFTAR PUSTAKA

James Midgley, Pembangunan Sosial, Pespektif Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial, (Jakarta: Ditperta Islam), tahun 2005, hal 35.

<http://www.tnp2k.go.id/id/program-keluarga-harapan-pkh/> (Diakses tanggal 21 November 2016)